

KEJAHATAN LINGKUNGAN

Perkuat Kolaborasi Penegak Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Para aparat penegak hukum dari berbagai instansi berkomitmen bekerja sama menangani kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Kolaborasi diperlukan untuk mengatasi kejahatan terorganisasi serta memiliki kapital dan sumber daya kuat.

Selain itu, tiap aparat saling membutuhkan demi mengejar batas waktu penyidikan pada kasus lingkungan dan kehutanan yang umumnya terjadi di lokasi terpencil dan butuh pembuktian keilmuan. Kolaborasi aparat hukum bisa memakai sejumlah undang-undang untuk menjerat pelaku kejahatan.

"Komitmen dari aparat penegak hukum untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan besar. Kami optimistis akan lebih baik dalam penyelamatan lingkungan dan mencegah kerugian negara lebih besar lagi (akibat kerusakan lingkungan)," kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu-

tanan, Selasa (23/7/2019), dalam Festival Gakkum di Jakarta.

Pembukaan Festival Gakkum menghadirkan pembicara yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin, Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Ali Mukartono, serta Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen (Pol) M Fadil Imran.

Dalam penanganan hukum lingkungan, tiap instansi saling membutuhkan. Contohnya, penyidik pegawai negeri sipil butuh penilaian jaksa agar dokumen penyidikan dilanjutkan ke penuntutan di pengadilan. Adapun penyidik polisi dan kejaksaan butuh tenaga ahli dari KLHK untuk menilai suatu pencemaran lingkungan.

Fadil Imran menegaskan, kejahatan lingkungan berhadapan dengan orang kuat. Jadi, aparat penegak hukum, termasuk polisi, tak bisa bertindak sendiri.

Ia menawarkan konsep sistem investigasi terintegrasi sebagai wadah aparat penegak hukum berkolaborasi menghadapi kejahatan lingkungan. "Yang kita hadapi *organized* (terorganisasi). Punya sumber daya di semua sektor dan lini. Ada divisi penerangan, hukum, keuangan, dan pemasaran," katanya.

Mengutip pendapat Ruggiero dan Gounev (2012), kejahatan lingkungan dilakukan sekelompok orang yang punya sumber daya dan kekuasaan. Pelaku mengeksploitasi warga lokal, bersembunyi di balik regulasi, dan mengakali hukum untuk menutupi pelanggaran hukum yang dilakukan.

Nilai kejahatan ini amat tinggi dan merugikan warga terdampak kerusakan lingkungan. Bahkan, kejahatan tumbuhan dan satwa liar berkelindan dengan kejahatan narkoba dengan nilai tinggi. Jika penegak hukum dan pengambil keputusan berkolaborasi, itu menciptakan daya gempur lebih besar dan ada efek jera. (ICH)

